

---

# Model Pemberdayaan Industri Batu Bata Dan Genteng Di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

Dahmiri

Email: [cikdahmiri@gmail.com](mailto:cikdahmiri@gmail.com)

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jambi

---

## **Abstract**

*The result shows that the empowerment level of coal mining industry and roof tile in Sarolangun regency are still low. The empowerment indicator consists of business access, market, human resource and technology. Based on FGD and in-depth interview with the key persons, it can be found that considering the business access could increase the empowerment. This can be done through management training and production creativity on credit loan with low interest, providing home trade in market access, marketing and exposing market opportunities, increasing technical skill by training on human resource, providing training to develop entrepreneur skill, offering an instructor, building an education institute and technological access by giving reachable technology, proposing patent's counseling and consultation.*

*Keywords: Model, Empowerment, Industry, Coal Mining And Roof Tile*

---

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Industri kecil dan menengah (IKM) memainkan peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan ekonomi baik di negara maju maupun negara berkembang. IKM sangat penting karena kelompok usaha tersebut merupakan kelompok yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan juga pada sisi lain kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) adalah yang paling besar jika dibandingkan dengan kontribusi dari usaha-usaha besar.

Pada saat krisis ekonomi, keberadaan industri kecil justru sangat penting dalam menyelamatkan perekonomian nasional. Industri kecil cenderung menggunakan bahan baku lokal dan bahan impor yang kecil proporsinya. Produksinya tidak terlalu dipengaruhi depresiasi nilai rupiah, sehingga lebih tahan terhadap guncangan perekonomian global, meskipun sangat dipengaruhi oleh perubahan daya beli masyarakat. Pada tahun 2006 total populasi IKM lebih dari 42 juta dan memberikan sumbangan dalam output nasional (PDRB) mencapai 56,7% dan dalam ekspor non migas 15%, serta mempunyai andil 99,6% dalam penyerapan tenaga kerja (Ardi Said dan Ika Widjaja, 2007).

Re-orientasi kebijakan oleh pemerintah perlu dilakukan dalam penataan ekonomi dengan mendorong terwujudnya iklim usaha yang lebih akomodatif misalnya memungkinkannya Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki akses yang lebih luas pada pasar, lembaga-lembaga keuangan, dan teknologi yang sesuai, sehingga IKM di Indonesia mampu berperan lebih strategis dalam struktur PDB (Tambunan, 2002). IKM yang kuat sangat diperlukan terutama di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Hal ini menurut Dally (2000) karena dua hal, yaitu: (a) IKM terbukti menjadi penyerap tenaga kerja sangat besar, dan (b) IKM dapat mempercepat proses distribusi pendapatan dan meminimalkan kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Namun demikian masih mengandung kelemahan-kelemahan seperti akses dan intervensi pasar, modal, dan teknologi serta lemahnya manajemen (Tambunan, 2002).

Dari berbagai penelitian terdahulu ada kesamaan prinsip, bahwa pemberdayaan IKM sangat dipengaruhi oleh sumberdaya manusia, teknologi, pemasaran, dan manajemen.

Kabupaten Sarolangun adalah salah satu Kabupaten yang terletak dalam Provinsi Jambi, merupakan salah satu kabupaten yang berkembang pesat. IKM yang tumbuh di kabupaten ini cukup banyak termasuk industri batu bata dan genteng. Namun demikian, masalah yang dialami industri batu bata dan genteng di Kabupaten Sarolangun umumnya adalah lemahnya pemberdayaan yang mereka miliki sehingga berdampak pada lambannya perkembangan usaha.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam pemberdayaan industri batu bata dan genteng juga hanya fokus pada upaya pemberian bantuan finansial. Sementara itu masalah riil yang dihadapi oleh industri batu bata dan genteng sendiri lebih kompleks, meliputi masalah pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, operasional dan pemasaran.

Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang meneliti pemberdayaan industri batu bata dan genteng di Kabupaten Sarolangun diharapkan mampu memberikan gambaran tentang sejauh mana tingkat pemberdayaan industri batu bata dan genteng dan dapat dirumuskan model pemberdayaan industri batu bata dan genteng.

## 1.2. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis permasalahan yang dihadapi dan tingkat keberdayaan industri Batu Bata dan Genteng di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
2. Merumuskan strategi dan model pemberdayaan Industri Batu Bata dan Genteng di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

## 1.3. Manfaat Penelitian

1. Keutamaan dari penelitian ini adalah berupaya mencari model dalam upaya pemberdayaan Industri Batu Bata dan Genteng di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
2. Hasil akhir dari penelitian ini akan berguna bagi Industri Batu Bata dan Genteng berupa pedoman dalam upaya pemberdayaan, masyarakat sekitar lingkungan usaha memperoleh manfaat mendorong perekonomian, pemerintah dapat memperoleh model dalam upaya pemberdayaan Industri Batu Bata dan Genteng di wilayahnya.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Industri Kecil Menengah (IKM)

Industri kecil adalah suatu kegiatan usaha industri yang memiliki nilai investasi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan industri kecil menengah adalah usaha industri dengan nilai investasi perusahaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589/MPP/KEP/10/1999). (Anonim, 2008b).

Definisi usaha kecil menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sementara itu, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (UU No.20 tahun 2008).

Menurut kategori *Biro Pusat Statistik* (BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu: (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih (BPS, 2006).

### 2.2. Pemberdayaan IKM

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberdayaan adalah suatu proses untuk berdaya, memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga untuk menguasai sesuatu. Oleh karena itu, pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memiliki atau menguasai kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik (Departemen Pendidikan Nasional, 2002).

Pengertian pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata "*empowerment*", yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. (Moeljanto dalam Wahono et al, 2001).

Menurut Bank Dunia, *Empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives*. Pemberdayaan merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat (Susilowati et al., 2005a).

Bentuk-bentuk pendekatan dan metode-metode dimana dalam merencanakan perkembangan penduduk lokal dilibatkan dan dapat mengekspresikan, meningkatkan, membagi, menganalisa pengetahuan atau pemahaman mereka, untuk secara aktif memungkinkan mereka merencanakan dan bertindak dalam pembangunan, lebih-lebih

di bidang ekonomi yang merekaterlibat secara langsung (Isbandi Rukminto Adi, 2003).

Kemampuan masyarakat untuk mewujudkan dan mempengaruhi arah serta pelaksanaan suatu program ditentukan dengan mengandalkan *power* yang dimilikinya. Sehingga pemberdayaan (*Empowerment*) merupakan *central theme* atau jiwa partisipatif yang sifatnya aktif dan kreatif (Setyoko, 2002).

Menurut Alen (1993) ada 3 unsur dasar di dalam pengembangan dan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat, yaitu:

**Pertama**, tujuannya untuk memampukan masyarakat dalam mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan mereka, mengembangkan kemandirian dan memantapkan kebersamaan diantara mereka. IKM yang merupakan usaha pada skala kecil, diperlukan adanya kebersamaan diantara mereka untuk mewujudkan kekuatan yang lebih besar baik pada modal, produksi sampai penguasaan pasar (Dirjen pembinaan pengusaha kecil, 1995).

**Kedua**, proses pelaksanaannya melibatkan kreatifitas dan kerja sama masyarakat ataupun kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut. Kerja sama dan kreativitas merupakan prasyarat untuk mewujudkan masyarakat yang dinamis, kreatif dan kooperatif. Konflik bisa terjadi apabila terjadi ketidakseimbangan pembagian hak dan tanggung jawab. Untuk menghindari hal tersebut maka dalam kebersamaan baik dari faktor produksi, proses produksi sampai pemasaran, harus jelas hak dan tanggung jawabnya (Isbandi Rukminto Adi, 2003).

**Ketiga**, pendekatan yang baik untuk digunakan adalah pengembangan masyarakat yang bersifat non direktif. Maksud pendekatan ini adalah memfokuskan pada peran pemercepat perubahan (*enabler*), pembangkit semangat(*encourager*) dan pendidik (*educator*). Demikian juga pemerintah atau swastadalam berhubungan dengan pengusaha-pengusaha kecil, pendekatan yang digunakan yang bersifat non direktif (Batten dalam Glen, 1993).

Makna pemberdayaan dalam Susilowati dan Mayanggita (2008) adalah suatu keadaan usaha sadar, terencana, dan berkesinambungan untuk melakukan perubahan dan target-target yang jelas, dari tingkat keberdayaan yang lemah menjadi lebih kuat, dari tidak berdaya/tidak mampu (*powerless*) menjadi berdaya/mampu (*power*), dari kondisi tidak terampil menjadi terampil, dari kondisi dibantu menjadi “mandiri” bahkan berubah menjadi membantu. Oleh karena itu tingkat keberdayaan dapat didefinisikan sebagai tingkat kemandirian suatu masyarakat dalam melakukan usaha mereka dalam hal kemampuan ekonomi maupun non ekonomi. Indikator tingkat keberdayaan dari aspek ekonomi meliputi akses usaha, akses informasi pasar, dan akses teknologi. Aspek non ekonomi meliputi akses lobi, keputusan usaha, menembus batas dan peran *stakeholders* (Susilowati, et al., 2005; Susilowati dan Mayanggita, 2008).

Shardlow (1998) menyimpulkan bahwa pengertian pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Pemberdayaan IKM tidak melakukan langkah-langkah instruktif, maupun mendikte, tetapi mendorong supaya IKM dapat berpartisipasi dalam menentukan kebijaksanaan yang berhubungan dengan IKM.

### 2.3. Kendala Pemberdayaan IKM

Sucherly (2006) menyatakan bahwa jumlah Usaha kecil sangat banyak tetapi tidak konsisten, bukan yang lama tambah yang baru, namun seringkali pula yang lama mati dan kemudian muncul yang baru. Faktor ini pulalah yang menyebabkan jumlah dari IKM sulit untuk diidentifikasi. Karena industri kecil banyak yang tidak teridentifikasi, maka industri kecil tersebut banyak pula yang luput dari perhatian pemerintah.

Tambunan (2007) menyatakan bahwa usaha kecil sebagian besar didorong oleh motivasi usaha individu dan tidak berangkat dari keahlian (*skill*), manajemen usaha. Oleh karena itu usaha kecil seringkali menyebabkan semakin meningkatnya masalah sosial, padahal umumnya industri kecil telah mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah.

Tambunan (2007) menyatakan bahwa meski diakui ketangguhannya, namun peran IKM dalam perekonomian nasional ternyata masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh sulitnya akses dalam pendanaan. Walaupun berbagai lembaga dan skim kredit untuk IKM telah dibentuk, kesulitan pengadaan bahan baku, ketergantungan produk IKM terhadap pasar domestik, belum tersedianya SDM yang handal sesuai dengan kebutuhan, belum siapnya IKM dalam menghadapi persaingan global karena produktivitas dan mutu yang rendah, masih lemahnya akses terhadap sumber informasi (pasar, teknologi dan disain), rendahnya penguasaan teknologi, serta sederet faktor lain merupakan IKM sulit berkembang.

## 3. Metode Penelitian

### 3.1 Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung maupun tidak langsung dengan pihak-pihak antara lain adalah instansi terkait serta pemilik IKM.

Data sekunder akan diperoleh dari instansi-instansi terkait, antara lain: Dinas Perindustrian Kabupaten Sarolangun, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun serta dinas-dinas yang melakukan pembinaan terhadap IKM di Kabupaten Sarolangun.

### 3.2 Metode Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini digunakan metode survey kepada sebanyak 76 orang yaitu semua pemilik usaha batu bata dan genteng di kabupaten Sarolangun, dengan mengumpulkan informasi dari seluruh responden yang diharapkan yang diharapkan akan memperoleh berbagai informasi. dalam metode survei ini adalah dengan menggunakan daftar kuesioner yang telah disiapkan terlebih dahulu.

### 3.3. Pendekatan Penelitian dan Analisis

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan profil sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang menjadi dasar penyusunan upaya pemberdayaan Industri batu bata dan

genteng yang sesuai dengan aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Data yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama adalah data primer yang terdiri pemberdayaan industri, ekonomi dan budaya masyarakat, metode pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara terstruktur menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Selain itu juga digunakan teknik *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam dengan *keypersons* (sebanyak 10% dari populasi) yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kondisi industri batu bata dan genteng. Disamping wawancara juga digunakan kuesioner terstruktur yang terkait dengan aspek-aspek yang akan diteliti. Penelitian ini akan berlangsung selama satu tahun (tahun pertama), dengan lokasi di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

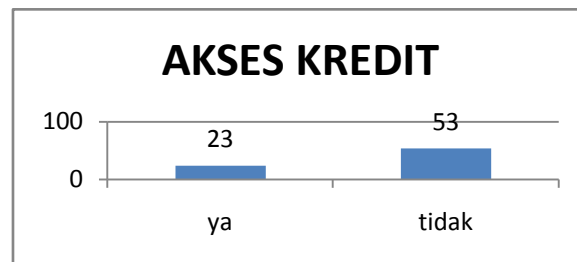
Penelitian ini akan menggunakan daftar kuesioner yang telah disiapkan terlebih dahulu. Pengumpulan informasi dari responden juga dilakukan dengan cara *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam dengan *keypersons*.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1 Pemberdayaan Industri Batu Bata dan Genteng

###### 1. Akses Usaha

Gambar 1. Akses Kredit Industri Batu Bata Dan Genteng Di Kabupaten Sarolangun



Sumber : Data primer diolah (2014)

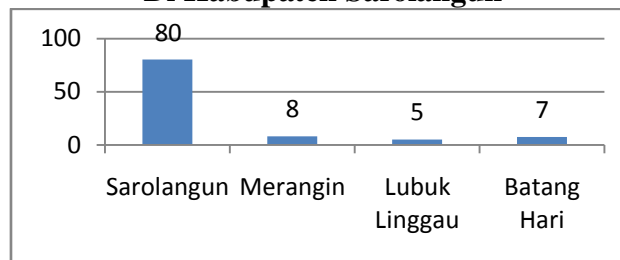
Dari 76 responden, yang menyatakan pernah mendapatkan kredit hanya 23 responden (30%) dari berbagai lembaga keuangan, perorangan, maupun dari instansi pemerintah. Responden yang menyatakan pernah mendapatkan kredit jauh lebih kecil dibandingkan yang menyatakan tidak pernah mendapatkan kredit. Sebanyak 53 orang (70%) menyatakan tidak mendapatkan kredit dari manapun dalam melakukan kegiatan usaha. Ironisnya lagi sebagian dari mereka mengaku tidak mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank. Prosedur peminjaman yang rumit dan hampir semua lembaga keuangan meminta jaminan, serta besarnya bunga pengembalian juga terasa memberatkan, juga menjadi penyebab rendahnya tingkat keberdayaan dari aspek akses usaha ini disebabkan soleh industri itu sendiri yang pada umumnya tidak dapat memenuhi apa yang menjadi syarat peminjaman

###### 2. Akses Pasar

Sebagian besar pelaku Usaha Industri Batu Bata dan Genteng di daerah penelitian

masih kurang mengerti berapa besar permintaan, desain produk dan kisaran harga, kualitas dan pelayanan yang disukai oleh masyarakat luas. Mereka cenderung hanya melakukan kegiatan produksi mengikuti desain dan pelayanan yang hampir sama antara satu industri dengan industri lainnya tanpa memperhatikan desain dan kualitas produk yang diinginkan konsumen secara pasti, bahkan ada juga yang mencontek desain produk dari pengusaha lain. Dari beberapa penjelasan mengenai akses pasar, menunjukkan bahwa tingkat keberdayaan responden Industri Batu Bata dan Genteng dalam memanfaatkan sumber informasi pasar relatif masih rendah. Pemasaran produk adalah sebagai berikut :

**Akses Pasar Industri Batu Bata dan Genteng  
Di Kabupaten Sarolangun**

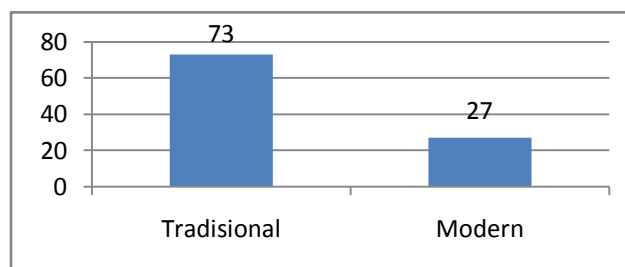


Sumber : Data primer diolah (2014)

Dari gambar dapat kita lihat bahwa sebagian besar, hasil produksi Industri Batu Bata dan Genteng Kabupaten Sarolangun untuk memenuhi pasar lokal yaitu Kabupaten Sarolangun sendiri yaitu 80%, sedangkan untuk akses pasar kabupaten tetangga masih sangat kecil, misalnya Kabupaten Merangin hanya 8%, Kabupaten Lubuk Linggau 5% dan Kabupaten Batang Hari 7%. Jika kita amati maka dapat kita simpulkan bahwa akses pasar Industri Batu Bata dan Genteng masih sangat rendah untuk menembus pasar di luar Kabupaten Sarolangun. Hal ini terjadi karena kurangnya ketersediaan akses informasi tentang pangsa pasar yang bisa dimasuki.

3. Akses Teknologi

**Teknik Produksi Usaha Kecil dan Menengah  
Di Kabupaten Sarolangun**



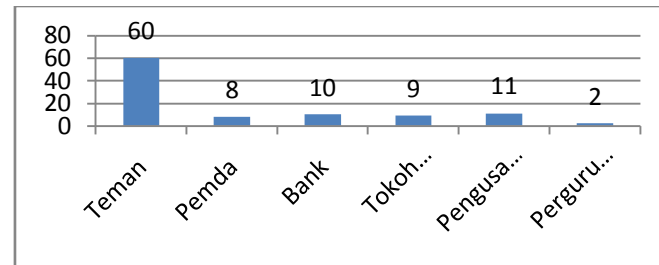
Sumber : Data primer diolah (2014)

Dari Gambar 4 diketahui bahwa sebagian besar responden (73%) menggunakan teknik produksi secara turun-temurun yang masih bersifat tradisional. Masih sedikit sekali responden yang melakukan perubahan perbaikan teknologi dalam memproduksi secara modern. Masih sedikit sekali responden yang mengikuti pelatihan formal dalam teknik produksi. Hal tersebut terjadi karena untuk menciptakan dan mengembangkan teknologi diperlukan biaya tinggi. Disamping itu

pada umumnya masalah teknologi ditangani oleh bagian *research and development* (R&D), sedangkan pada Industri Batu Bata dan Genteng struktur organisasinya masih sangat sederhana yang tidak memiliki bagian *research and development*.

#### 4. Kemampuan Lobi

**Kemampuan Lobi Responden**



Sumber : Data primer diolah (2014)

Kemampuan lobi responden masih rendah. Kemampuan responden dalam melobi pihak-pihak yang seharusnya menjadi sasaran yang akan mampu membantu peningkatan keberdayaan usaha. Lobi yang paling banyak dilakukan oleh responden hanya kepada teman yaitu sebanyak 60 %. Kemampuan lobi kepada pihak Pemda hanya dilakukan 8%, dan kepada pengusaha hanya 8%.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kemampuan dan keberanian untuk lobi bagi responden di daerah penelitian adalah masih relatif kecil. Hal ini terlihat dari indikator:

- Punya atau tidaknya responden atas akses dengan seseorang (kenalan atau famili) di pemerintahan (pemda), KUD, tokoh masyarakat atau pejabat, lembaga keuangan, pengusaha, LSM, ataupun perguruan tinggi.
- Pernah minta tolong atau tidak dengan para pemangku jabatan (*stakeholders*). Apabila pernah minta pertolongan maka dianggap responden sudah pernah melakukan pendekatan atau lobi.
- Apabila permintaan pertolongan dengan salah satu *stakeholders* sampai berhasil, dapat dipakai sebagai indikasi bahwa intensitas lobinya semakin intens.

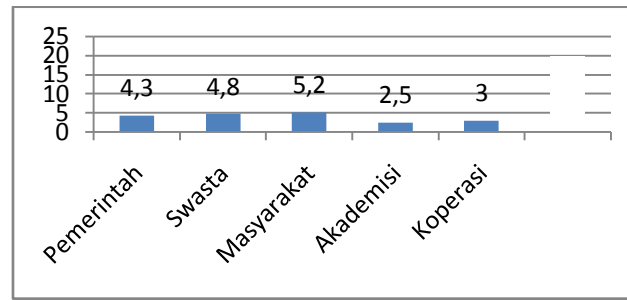
Berdasarkan hasil wawancara maka dapat ditarik kesimpulan bahwa responden usaha industri batu bata dan genteng di daerah penelitian mempunyai hubungan yang lebih sempit atau menunjukkan kemampuan lobi yang rendah. Apabila dilihat dari hubungan antara pengusaha dan *stakeholders* terlihat bahwa sebagian besar dari mereka tidak memiliki kenalan pada semua *stakeholders* sehingga hal ini akan memperlemah kemampuan pemilik usaha di daerah penelitian dalam usaha peningkatan pemberdayaan mereka.

#### 5. Peran *Stakeholders*

*Stakeholder* dapat dianggap sebagai salah satu pihak yang seharusnya dapat membantu peningkatan pemberdayaan industri batu bata dan genteng. *Stakeholders* ini terdiri dari pemerintah, pengusaha, masyarakat, LSM, akademisi dan KUD. Dari penilaian responden dengan skala 1 - 10 maka dapat dilihat peran Peran *stakeholders* menurut responden dapat dilihat pada gambar berikut :



### Peran Stakeholders

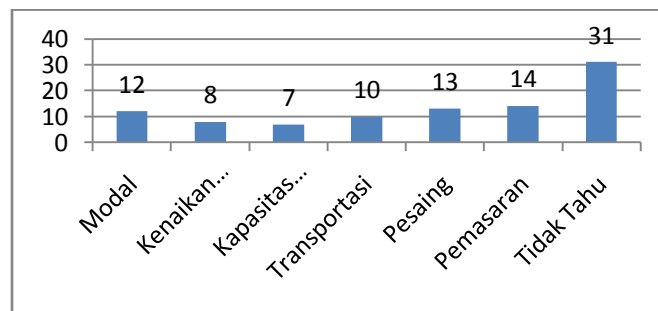


Sumber : Data primer diolah (2014)

Dari gambar terlihat bahwa peran *Stakeholders* dalam membantu peningkatan pemberdayaan industri batu bata dan genteng di Kabupaten Sarolangun masih rendah. Peran pemerintah, akademisi, masyarakat dan LSM dirasa masih sangat rendah terhadap kegiatan industri di daerah penelitian pada semua aktifitas responden. Oleh karena itu, ke-depan diharapkan pemerintah lebih berperan pada seluruh aktifitas industri, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan baik secara ekonomi maupun non ekonomi. Peran akademisi, masyarakat, LSM yang masih sangat rendah pada seluruh kegiatan industri batu bata dan genteng perlu ditingkatkan lagi agar kemampuan usaha mampu meningkatkan keberdayaan mereka. Peran akademisi dan LSM yang diharapkan industri adalah penciptaan teknologi baru untuk meningkatkan kapasitas produksi dan juga efisiensi. Selain itu juga perlunya bimbingan dan penyuluhan manajemen produksi, manajemen keuangan dan penanganan limbah pada proses produksi di daerah penelitian

#### 6. Keberlanjutan Usaha

### Kendala Yang Dihadapi Industri



Sumber : Data primer diolah (2014)

Dari gambar menunjukkan bahwa responden lebih banyak yang tidak mengetahui kendala yang dihadapi untuk keberlanjutan usahanya yaitu sebanyak 31 responden atau 37%, sedangkan kendala dari sisi pesaing sebanyak 10 responden atau 14% dan dari sisi modal sebanyak 9 responden atau 12%. Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengalaman dalam usaha. Tingkat pendidikan sebagian besar responden adalah SLTA (39%).

## 4.2 Upaya Pemberdayaan Industri Batu Bata dan Genteng

### 1. Akses Usaha

Peningkatan keberdayaan industri batu bata dan genteng di Kabupaten Sarolangun berdasarkan akses usaha dapat dilakukan melalui permodalan dan produksi. Dari analisis efisiensi pada sisi produksi diketahui, bahwa ada penggunaan faktor produksi yang efisien dan yang tidak. Dalam akses usaha yang perlu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti masalah efisiensi di atas, maka diusulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Menyediakan media dan sarana konsultasi usaha.
- b. Aktivasi lembaga penjamin
- c. Penjaminan mutu
- d. Melakukan Pelatihan usaha
- e. Menggalang kerjasama dengan berbagai pihak
- f. Peningkatan teknik produksi

Berbagai pihak yang terkait di Kabupaten Sarolangun antara lain adalah pemerintah, swasta, lembaga keuangan dan masyarakat. Dalam jangka pendek perlu dilakukan pelatihan manajemen, kreativitas dalam produksi, pengawasan dan monitoring proses produksi. Dalam jangka panjang perlu dibuat perencanaan proses produksi secara efisien.

### 2. Akses Pasar

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap Upaya Peningkatan Pemberdayaan Industri Batu Bata dan Genteng di Kabupaten Sarolangun, diperoleh informasi dan data bahwa tingkat keberdayaan masih rendah. Oleh karena itu diperlukan usaha Peningkatan keberdayaan melalui berbagai strategi diantaranya adalah :

- a. Menyediakan Informasi Pasar tentang permintaan harga, segmen harga, selera, informasi ketersediaan produk di pasar dan informasi status pasar produk pesaing.
- b. Mengupayakan penyediaan Informasi dan Pameran perdagangan dengan membuat agenda/*tracking Event* pameran dan membangun jaringan dengan institusi mitra untuk pertukaran program pameran.
- c. Membuka peluang pasar dengan melakukan kerjasama dengan *Stakeholders* lokal terutama dalam hal pemasaran produk
- d. Menyediakan rumah dagang (outlet), mengoptimalkan lokasi sentra khusus usaha dan penerapan sistem bapak angkat untuk membantu yang kekurangan modal.

Upaya pemberdayaan industri di Kabupaten Sarolangun dari akses pasar melibatkan berbagai pihak di antaranya adalah pemerintah seperti Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta organisasi kemasyarakatan

### 3. Akses SDM

Upaya Pemberdayaan Industri Batu Bata dan Genteng di Kabupaten Sarolangun dari akses SDM masih rendah. Strategi Upaya Peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan dan pelatihan dibagi menjadi dua macam yaitu yang formal dan non formal. Pendidikan formal dilakukan melalui perguruan tinggi atau sekolah kejuruan dengan berbagai program seperti memberikan beasiswa, dana CSR, pengabdian masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata bagi mahasiswa.

Pendidikan informal dilakukan dengan mengadakan pelatihan manajerial, pelatihan kewirausahaan, pengelolaan produksi, pemasaran dan distribusi produk. Program lain pendidikan informal misalnya memberikan penyuluhan dan program kampanye yang bekerjasama dengan mitra usaha. Pelaksana pendidikan dan pelatihan non formal dapat dilakukan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sarolangun. Program pelatihan misalnya latihan/simulasi proses produksi (desain, *input* produksi, proses produksi, dan pengepakan) serta distribusi pemasaran.

Adapun pihak yang terkait dalam upaya Pemberdayaan Industri Batu Bata dan Genteng di Kabupaten Sarolangun diantaranya adalah pihak pemerintah, pihak swasta, LSM dan pihak akademisi. Upaya pemberdayaan diperlukan skala prioritas pelaksanaannya. Dalam jangka pendek perlu segera melakukan pelatihan manajerial, kewirausahaan, pemasaran dan distribusi serta memetakan peluang CSR secara intensif. Dalam jangka panjang, pemerintah harus menyediakan tenaga penyuluh dan tim kreatif guna membantu pelaku usaha dalam memperkaya desain produk serta membuka lembaga pendidikan ketrampilan yang terkait seperti Sekolah Kejuruan Industri Kreatif dan lain sebagainya.

### 4. Akses Teknologi

Teknologi yang digunakan dalam menjalankan usaha industri batu bata dan genteng di Kabupaten Sarolangun digolongkan menjadi dua macam, yaitu :

#### a. Teknologi tepat guna

Teknologi tepat guna yang dimaksud adalah teknologi sederhana yang diterapkan oleh produsen untuk keperluan produksi pada umumnya industri di Kabupaten Sarolangun menggunakan teknologi tepat guna dalam produksi. Upaya pemberdayaan dalam akses teknologi lebih difokuskan pada peningkatan penggunaan teknologi. Kegiatan yang dilakukan pada akses ini antara lain :

- Menyediakan fasilitas penyuluhan dan penggunaan teknologi inovatif dalam proses produksi dan pembuatan desain, kemasan dan pemasaran menggunakan dukungan teknologi elektronik.
- Sampai saat ini belum ada yang memiliki hak paten terhadap produknya, oleh sebab itu perlu diupayakan perlindungan terhadap hak paten.
- Mengupayakan semaksimal mungkin pemanfaatan peluang CSR antara lain melakukan pelatihan terhadap produsen, terutama yang berkaitan dengan proses produksi dan manajerial.
- Mengupayakan Pelatihan penerapan teknologi baru untuk mendukung produk yang berkualitas

b. Teknologi modern

Agar memiliki tingkat keberdayaan yang tinggi, harus berupaya untuk beralih dari teknologi tradisional menjadi teknologi modern. Dalam peralihan ini diperlukan sarana dan prasarana konsultasi dan pelatihan penggunaan teknologi tersebut. Perlu disediakan wadah tempat konsultasi setiap saat. Pada wadah ini akan didiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan proses peralihan teknologi. Pihak yang terkait dalam upaya ini, khususnya dari akses teknologi adalah pemerintah, swasta dan akademisi.

Dalam jangka pendek perlu diprioritaskan pelatihan penerapan dan informasi teknologi baru, sedangkan jangka panjang adalah bimbingan konsultasi hak paten dan fasilitasi peralatan produksi.

Dari penjelasan di atas dari aspek usaha, pasar, SDM dan teknologi dapat disimpulkan bahwa Upaya pemberdayaan di daerah penelitian diperlukan peran aktif dari berbagai pihak untuk meningkatkan keberdayaan industri di Kabupaten Sarolangun dan melakukan tindakan nyata yang didasarkan pada prioritas jangka pendek dan jangka panjang, sehingga apa yang menjadi harapan semua pihak terutama pelaku Industri Batu Bata dan Genteng di Kabupaten Sarolangun menjadi kenyataan.

## **5. Kesimpulan dan Saran**

### **5.1. Kesimpulan**

1. Tingkat keberdayaan industri batu bata dan genteng di Kabupaten Sarolangun masih rendah. Indikator keberdayaan tersebut meliputi akses usaha, pasar, SDM, dan teknologi.
2. Berdasarkan hasil FGD dan wawancara mendalam dengan *keypersons* ditemukan bahwa keberdayaan industri batu bata dan genteng di keberdayaan tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa akses yaitu akses usaha, akses pasar, akses SDM dan akses teknologi.

### **5.2. Saran**

1. Dalam Jangka pendek akses usaha yang perlu dilakukan adalah pelatihan manajemen dan kreativitas dalam produksi serta pengawasan dan monitoring proses produksi. Pada Akses pasar dengan cara merintis rumah dagang, pameran, membuat leaflet, booklet, catalog, layer, web, memberikan informasi pasar, informasi pameran perdagangan, memberikan konsultasi bisnis, pada akses SDM melakukan pelatihan manajerial, kewirausahaan, pemasaran dan distribusi, dan akses teknologi.
2. Dalam jangka panjang perlu dilakukan kegiatan dalam akses usaha membuat perencanaan proses produksi, perlindungan HaKI/paten, dalam akses pasar mengupayakan bapak angkat, menyediakan lokasi sentra khusus industri batu bata dan genteng, menyelenggarakan pameran perdagangan tingkat daerah, melakukan kerja sama dengan *stakeholders* lokal, sedangkan akses SDM, pemerintah dapat menyediakan tenaga penyuluh, membuka lembaga pen didikan dan ketrampilan, akses teknologi perlu dilakukan bimbingan konsultasi HaKI/ patendan fasilitasi peralatan produksi

---

## Referensi

- Ade Octavia dkk (2012), Evaluasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Penerima Bantuan Pemerintah dan Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Bersangkutan Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Provinsi Jambi.
- Anonim, 2008a. Kebijakan Pembagungan UKM Departement Industri dan Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta
- Anonim, 2008b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Depkumdam dan HAM, Jakarta
- Ardi Said dan N. Ika Wijaya. 2007. *Akses Keuangan UMKM. Buku untuk Membangun Akses Pembiayaan bagi Usaha Menengah, Kecil dan Mikro*. Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung e.V. dan GTZ-RED.
- Bappeda Kab. Sarolangun, 2009. Studi Kelayakan Potensi Investasi di Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009.
- Dally, John A. 2000. *Improving Technology Performance in Small and Medium Enterprises*, American Development Bank, Washington.
- Dahmiri, 2013. Upaya Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Rangka Mendorong Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
- Glen, Andrew (1993). *Community and Public Policy*. Pluto. London
- Glueck, WF & Jauch LR. 1994. *Manajemen strategis dan kebijakan perusahaan*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Isbandi Rukminto Adi. 2003. *Pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas : pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis*. Seri Pemberdayaan. Edisi revisi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Susilowati, Indah; Mujahirin Tohir; Waridin; Tri Winarni; Agung Sudaryono 2005a. Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Usaha Mikro, ecil, Menengah Dan Koperasi- UMKMK) Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Kabupaten/Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Universitas Diponegoro. Tahun II. Riset Unggulan Kemasyarakatan dan Kemitraan (RUKK). Tahun II. Ristek. Jakarta
- Susilowati, I dan Mayanggita Kirana. 2008. *Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Mikro Kecil Di Sektor Perikanan*. Buku Ajar Berbasis Riset. Badan Penerbit Undip Semarang.
- Tambunan, 2002. *Perekonomian Indonesia. Teori dan Temuan Empiris*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Wahono, Ary. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Media Presindo. Yogyakarta.